

# Ojol dan Taksi Online Minta Perlindungan

**SURABAYA** - Pengemudi ojek online (ojol) dan taksi online kembali turun ke jalan. Mereka mendesak ada perlindungan, terutama kepada ojek online.

Kordinator tim 15 Jatim Ojek Bersama (JOB), David Walalangi saat ditemui usai pertemuan dengan perwakilan Dishub Jatim mengatakan, ada beberapa poin yang disampaikan pada aksi kali ini. Salah satunya tentang perlindungan kepada ojol. "Mereka kerap terintimidasi. Harus ada jaminan keamanan kepada kami dengan panyung hukum," ujar David Walalangi, Jumat (13/7).

Selain masalah perlindungan kepada pengemudi ojek online, mereka juga menginginkan adanya perbaikan sistem pada aplikasi yang kerap *suspend*. Kemudian kenaikan tarif dasar, Rp 3000 per km untuk roda dua dan Rp 5 ribu per km bagi taksi online. Lalu minimal order ojek online Rp 10 ribu serta R4 Rp 15 ribu.

Mereka meminta ada penurunan prosentase pada potongan tarif aplikasi, segera diterbitkan peraturan gubernur sebagai kepastian hukum ojol. Dan, yang terakhir adalah meminta perlindungan terhadap zona dianggap merah.

Menanggapi hal tersebut, Subdirektorat Angkutan Orang Kementerian Perhubungan Syafrin Liputro yang datang langsung menemui perwakilan pengemudi menyampaikan, untuk ojek online sangat sulit dipaksakan menjadi angkutan umum. Sebab, dalam undang-undang disebutkan bahwa sepeda motor bukanlah angkutan umum.

"Di Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan orang, sepeda motor adalah angkutan perorangan dan bukan angkutan umum. Se-



**TUNTUT KESEJAHTERAAN:** Puluhan driver ojek online beriringan menuju depan gedung Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Kamis (13/7) untuk menyampaikan aspirasi.

hingga Kementerian Perhubungan tidak bisa lakukan pengaturan terhadap roda dua sebagai angkutan umum. Tidak bisa dipaksakan, karena amanat undang-undang seperti itu," kata Syafrin. Tidak diaturnya sepeda motor sebagai angkutan umum inilah, yang lantas membuat pihak Kemenhub tak bisa mengkomodir masalah tarif dasar. Syafrin pun menyerahkan persoalan tersebut kepada aplikasi sebagai pemilik wewenang.

Hal ini tentunya berbeda dengan taksi online, masalah tarif telah diatur dalam peraturan direktorat jenderal hubungan darat kemenhub.

"Mobil silahkan jika ada usulan daerah disampaikan ke kementerian perhubungan untuk dilakukan evaluasi dan disesuaikan," sebutnya.

Vice President Corporate Communications Gojek Michael Say mengaku bakal mempertimbangkan masukan para pengemudi online di Jatim. Mengenai *suspend* yang dikeluhkan, dirinya menuturkan bahwa hal tersebut demi meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan. "Tidak sepihak masalah *suspend*, kami sudah komunikasikan kepada driver dan sudah melalui sosialisasi," kata Michael Say saat ditemui di Gedung Negara Grahadi. (bae/rud)

## Raperda Tambang Akhirnya Dibahas

**SURABAYA** - DPRD Jatim akhirnya mulai melakukan pembahasan peraturan daerah (raperda) tentang pengelolaan pertambangan. Raperda ini dinilai memiliki peran penting. Pasalnya beberapa perizinan pasca Undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, kewenangannya beralih ke Pemprov Jatim.

Anggota Komisi D DPRD Jatim Muhammad Bin Mu'afi Zaini mengatakan, pemprov memiliki peran yang penting dalam melakukan pengelolaan pertambangan. Terlebih setelah beralihnya kewenangan. Diharapkan dengan adanya regulasi nantinya pertambangan di Jatim lebih teratur dan tertata rapi. "Dengan raperda pertambangan diharapkan juga dari sisi keuangan atau PAD (pendapatan asli daerah) juga mengalami peningkatan," ujar politisi yang akrab disapa Gus Mamak tersebut, Jumat (13/7).

Tak hanya itu, politisi Partai Golkar tersebut memandang, dengan peraturan daerah ini nantinya pengawasan bisa dilakukan secara optimal. Sehingga kasus-kasus pertambangan yang dahulu pernah terjadi tak terulang lagi. Yang selama ini disebabkan kurangnya sumber daya manusia (SDM). Sehingga membuat pengawasan kurang begitu optimal.

Pihaknya mengusulkan dalam Raperda ini nanti juga ada penambahan personil atau SDM untuk pengawasan pertambangan. Baik dari tenaga PNS maupun Honoror. "Untuk tambahan pengawasan ini nanti pihaknya akan terlebih dahulu membahasnya dengan pihak eksekutif agar ada anggaran khusus atau sharing dengan kabupaten/kota, sehingga pengawasan pertambangan di 38 kabupaten/kota di Jatim bisa berjalan optimal," bebarnya.

Gus Mamak menambahkan, Raper-

da Pertambangan yang dibahas oleh komisi D DPRD Jatim juga menyiapkan sanksi atau punishment bagi pertambangan yang melanggar aturan, yaitu sanksi administrasi hingga penutupan proses pertambangan.

Sementara itu anggota komisi D DPRD Jatim lainnya, Sanwil menyampaikan, sebenarnya sudah sejak lama pihaknya mendorong Pemprov Jatim untuk segera menyelesaikan raperda tersebut. Namun, saat itu legislator terkendala akan landasan hukum di atasnya. Tidak adanya undang-undang atau peraturan pemerintah yang mengatur mengenai hal tersebut. Akhirnya diulur-ulur hingga tahun 2018. Padahal dengan mundurnya jadwal penyelesaian raperda soal izin galian C, maka yang dirugikan justru Pemprov Jatim. "Kami Harap dengan pembahasan raperda pertambangan ini bisa selesai pada tahun 2018 ini," kata Sanwil. (bae/rud)

## Sekdaprov Pastikan Investasi di Jatim Banyak Keuntungan

**SURABAYA** - Suasana Provinsi Jawa Timur yang semakin kondusif menyebabkan iklim usaha yang ada sangat menjanjikan bagi para investor yang ingin melakukan investasi di dalamnya.

Tawaran tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Akhmad Sukardi MM saat melakukan wawancara dengan TV Tianjin terkait perkembangan kerja sama antara Jatim dengan Tianjin di ruang kerjanya di Jl. Pahlawan No 110 Surabaya, Jumat (13/7).

"Saya pastikan jika Anda investasi di Jatim pasti banyak untungnya karena iklim yang kondusif menjadi daya tarik bagi investor," ujarnya.

Sebagai pintu utama Indonesia bagian timur, Jatim



**KUNJUNGAN:** Sekda Provinsi Jatim H Akhmad Sukardi (kiri) menerima Jasper Ho Perwakilan dagang dari Tianjin China di ruang kerja Jalan Pahlawan 110 Surabaya.

merupakan wilayah yang memiliki stabilitas perekonomian dan keamanan yang senantiasa terjaga. Pemprov Jatim selalu mengundang investor dan memberikan empat jaminan berupa kemudahan perijinan, penyelesaian masalah perburuhan, ketersediaan listrik dan fasilitas penyediaan tanah.

Berdasarkan, hasil riset

dari *The Asia Competitiveness Institute (ACI) of The Lee Kuan Yew Institute* pada tahun 2017, Jatim menempati peringkat pertama kemudahan berbisnis (*ease of doing business*) di Indonesia

Sekdaprov mengatakan, kerja sama antara Jatim dengan Tianjin secara resmi telah dimulai pada tahun 2003 melalui *letter of intent* pada bidang ekonomi, per-

dagangan dan iptek.

Kerja sama lain, dilanjutkan pada tahun 2012 meliputi MoU bidang pertanian, pariwisata, pariwisata, olahraga, seni dan budaya, pendidikan, transportasi dan pengembangan kota serta kesehatan. Sementara pada tahun 2015 dilakukan Technical Agreement bidang pendidikan kejuruan juga *letter of intent* bidang pendidikan kejuruan di tahun 2017.

Menurutnya, kerja sama yang telah terjalin tersebut, menghasilkan kegiatan yang telah diimplementasikan, antara lain operasi transplantasi hati oleh tim dokter kedua provinsi, pertukaran pelatih dan atlet pada cabang olahraga, pelaksanaan seminar Trade, Tourism and Investment (TTI). (hum/no)

# FENOMENA



**IDENTIFIKASI BIOMETRIK:** Warga yang sudah melakukan perekaman e-KTP, tak dapat melakukan pengecekan data hasil perekaman.

## Target Cetak 32 Ribu e-KTP Terhambat

**DUA HARI PEREKAMAN...**

Dia mengungkapkan, permasalahan tersebut sebenarnya cukup mengganggu target dari Dispendukcapil. Target penyelesaian 32 ribu e-KTP yang siap cetak dari persediaan blanko sebanyak 23 ribu menjadi terhambat. "Meski hanya dua hari tapi bisa menunda ribuan perekaman," ucapnya.

Pejabat yang akrab disapa Anang ini mengungkapkan, salah satu kendala dari masalah tersebut yakni belum bisa dilakukan pengecekan, apakah bisa dicetak KTP elektroniknya atau tidak bagi pemohon e-KTP. Karena itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kemendagri agar segera bisa dilakukan perbaikan. "Bisa perekaman tapi datanya gak bisa masuk kan percuma," jelasnya.

Menurutnya, para pemohon e-KTP diharapkan juga intens dalam menerima informasi dari Dispendukcapil. Di antaranya ke-siapan perekaman hingga pencetakan e-KTP. "Kami

siap memberikan informasi sedetail-detailnya kepada masyarakat Surabaya agar target penyelesaian e-KTP tuntas," terangnya.

Sebelumnya, demi mengejar target penyelesaian e-KTP ini, Wali Kota Tri Rismaharini melakukan terobosan-terobosan dan terjun langsung ke lokasi pelayanan e-KTP di Gedung Siola. Risma meminta Dispendukcapil menyediakan komputer untuk mengambil nomor antrian satu ke pengajuan permohonan cetak e-KTP. Kemudian, tambahan dua alat printer e-KTP bagi data NIK yang sudah siap cetak serta menyiapkan aktivitas dengan finger scan.

Anang menambahkan, dengan berbagai inovasi itu total alat cetak saat ini berjumlah 11 buah dan e-KTP yang sudah siap cetak dilayani dalam program *one day service*. Selain itu, beberapa dinas seperti turut dilibatkan untuk membantu membuat penanda dan zonasi alur pelayanan kependudukan. Tujuannya, supaya warga tidak bingung. (\*/no)

## Perlu Pelayanan Door to Door

**DINAS** Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) diminta terjun langsung ke masyarakat untuk jemput bola melayani perekaman dan pencetakan e-KTP. Pendataan masyarakat yang belum ber e-KTP sangat penting dilakukan.

Ketua Komisi A DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto mengatakan, terobosan memang harus terus dilakukan oleh Dispenduk-

capil. Salah satunya pelayanan e-KTP yang jadi sentral bagi masyarakat. "Terus cari celah agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan maksimal," katanya.

Politisi Demokrat ini meminta agar Dispendukcapil juga *door to door* melalui pelayanan di kecamatan. Sehingga, pelayanan tidak hanya terpusat di kantor Dispendukcapil tetapi juga menyebar di sejumlah kecamatan.

"Kecamatan dan kelurahan jadi ujung tombak pendataan identitas masyarakatnya yang belum ber-KTP elektronik," ujarnya.

Menurutnya, terobosan yang dilakukan juga bisa memangkas jarak antre di kantor pelayanan. Sehingga orang tidak malas mengurus e-KTP yang saat ini jadi identitas vital dalam sejumlah urusan. "Kami siap menerima laporan apapun jika pelayanan

tidak memuaskan," jelasnya.

Masa kerja pelayanan perekaman maupun pencetakan hendaknya ditambah. Petugas juga bisa diusulkan mendapatkan tunjangan kinerja yang maksimal karena bekerja di luar jam kerja ASN yang lain. "Tidak masalah diberikan tunjangan kinerja tinggi karena pulangnya malam demi pelayanan ke masyarakat," pungkasnya. (vga/no)